

MK DIDESAK TOLAK PERMOHONAN UBAH PEMILU

Ull Minta Pertahankan Sistem Pemilu Terbuka

SLEMAN (KR) - Sebagai pengawal demokrasi (*the guardians of democracy*), Mahkamah Konstitusi (MK) sudah seleyaknya dan seharusnya menolak permohonan perubahan sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup. Karenanya Rektor Ull, Departemen Hukum Tata Negara dan Pusat Studi Hukum Konstitusi FH Ull mendesak MK menolak perkara Nomor 114/PUU/XX/2022 dan tetap mempertahankan sistem pemilu terbuka.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan Rektor Ull Prof Fathul Wahid PhD kepada media, Selasa (13/6). Hal tersebut disampaikan karena MK menjadwalkan agenda pengucapan putusan Perkara Nomor 114/PUU/XX/2022 pada Kamis (15/6) besok. "Putusan MK ini akan menentukan nasib sistem Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 apakah akan diselenggarakan tetap secara proporsional

terbuka atau diubah dengan sistem proporsional tertutup," ujarnya.

Sikap Ull sebut Fathul selaras dan konsisten dengan Putusan MK Nomor 22/PUU/IV/2008 terdahulu yang menegaskan bahwa dasar penetapan calon terpilih berdasarkan calon yang mendapatkan suara terbanyak secara berurutan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang ditetapkan hanya di internal partai politik (parpol).

Dengan sistem pemilu terbuka, lanjutnya, memastikan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat dan pemeliharaan iklim demokrasi terus lestari dan berjalan dengan baik di Indonesia. Sistem pemilu terbuka akan menjamin bahwa calon wakil rakyat yang terpilih adalah benar-benar pilihan rakyat sendiri dan bukan hanya pilihan parpol. "Sistem Pemilu terbuka akan memperkuat partisipasi dan kontrol publik

terhadap wakil rakyat yang akan duduk di parlemen. Partisipasi dan kontrol publik ini berangkat dari hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya yang merupakan ciri pelaksanaan sistem demokrasi," tandas Fathul Wahid yang juga dibenarkan Kepala Departemen HTN Dr Jamaluddin Ghafur SH MH dan Direktur PSHK FH Ull Dian Kus Pratiwi SH MH.

Selain memberikan catatan yang mendesak MK menolak Perkara Nomor 114/PUU/XX/2022 dan tetap mempertahankan sistem Pemilu terbuka, Ull juga mendukung KPU untuk tetap fokus menyelenggarakan tahapan pemilu 2024 agar tercipta pemilu yang berintegritas. "Ull juga meminta parpol untuk melakukan pendidikan dan pembinaan kepada kadernya agar dapat menciptakan iklim politik yang sehat dan berkualitas," tambah Fathul Wahid. **(Fsy)-f**

Kemenangan Sambungan hal 1

pelatih asal Korsel ini gagal memainkan Sandy Walsh yang harus menepi akibat cedera.

"Tidak bisa main di FIFA Matchday, kali ini. Akan tetapi tidak akan dikembalikan ke klub. Memang di pikiran saya memang Sandy itu sebagai line up pertama. Namun, karena tidak bisa dimasukkan line up, jadi sangat disayangkan," papar Shin Tae-yong.

Dengan kondisi tersebut, Timnas Indonesia kemungkinan akan memainkan formasi 5-4-1 yang nantinya bisa berubah jadi 3-4-2-1 dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Komposisi ini nantinya kemungkinan akan menempatkan Dimas Drajad sebagai penye-

rang tunggal didukung Jacob Sayuri dan Shayne Pattynama di posisi sayap.

"Sebagai pemain depan harus lebih fokus dalam penyelesaian akhir. Jadi kami harus memanfaatkan latihan karena tidak tahu di pertandingan, semoga 1 peluang bisa mencetak 1 gol," tegas Dimas Drajad.

Sementara di pihak Palestina, skuad tim besutan pelatih Makram Daboub diperkirakan tampil dengan formasi 4-2-3-1 dengan menampilkan Mahmud Wadi jadi penyerang tunggal didukung 3 gelandang serang Tamer Seyam, Mohammed Yaheen, dan Islam Btran. **(Hit)-f**

Borobudur Sambungan hal 1

Dengan begitu, ia juga berharap, kawasan pariwisata Borobudur dapat membantu pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 8,5 juta wisman pada 2023 dan 14 juta wisman pada 2024. "Dan khusus untuk Borobudur dengan kondisi 42 persen masyarakat ASEAN beragama Budha, ini bisa menjadi destinasi wisata spiritual yang bisa menampung lebih dari kunjungan 20 juta wisman dengan interkoneksi melalui infrastruktur yang dibangun," ujar Menparekraf.

Pemerintah telah membangun sejumlah infrastruktur untuk melengkapi sarana dan prasarana kawasan pariwisata Borobudur, di antaranya, Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo (DIY), akses jalan tol, jalur kereta api, dan juga balai ekonomi desa (Balkondes) serta desa wisata. Pengembangan kawasan pariwisata juga ditujukan untuk menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024.

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, Perpres itu nantinya akan membuat pengelolaan kawasan pariwisata Borobudur menjadi satu atap antara Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan Kementerian BUMN. Kemudian akan dibentuk pula dewan pengawas yang beranggotakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemerkor Marves).

"Tapi PT Taman Wisata Candi Borobudur (TWC) sebagai pengelola, sehingga bagaimana TWC bisa menyeimbangkan untuk kepentingan heritage atau konservasi, kan kita tahu Borobudur terus menurun, lalu juga untuk spiritual keagamaan seperti saat peringatan Hari Waisak ke-100, untuk pariwisata sendiri, dan tentu untuk pendidikan," kata Erick. **(Ant/San)-f**

Biaya Sambungan hal 1

Siti Nadia menjelaskan, selama status kedaruratan kesehatan belum dicabut maka Pemerintah mempunyai kewajiban membiayai perawatan pasien Covid-19, termasuk mereka yang tidak memiliki BPJS Kesehatan. "Artinya kalau dulu orang tidak punya BPJS, kan pasti dibayar oleh Pemerintah dan uangnya uang Pemerintah, tapi belum masuk mekanisme PBI," katanya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan, sistem pembiayaan yang akan digunakan berbeda dengan pembiayaan perawatan Covid-19 saat ini yang berupa skema perawatan harian. Penanggungungan biaya perawatan

pasien Covid-19 akan disesuaikan dengan diagnosis pasien, sama seperti skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Kami siapkan, BPJS akan bekerja sebaik-baiknya menyiapkan diri. Kami sudah membuat satu skenario, bagaimana langkah-langkah, strategi itungan-itungan termasuk persiapan apa yang harus dilakukan," katanya.

Ghufron menjelaskan, tanggung jawab tersebut hanya berlaku bagi peserta BPJS Kesehatan, termasuk PBI ketika terinfeksi Covid-19 saat endemi. Karena itu Ghufron mengajak masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan untuk segera mendaftarkan diri, sebab biaya

pemulihan pasien Covid-19 biasanya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, Presiden Joko Widodo sudah mengambil keputusan terkait kebijakan terbaru soal pandemi Covid-19 dan peralihan status menjadi endemi di Indonesia. "Nanti Presiden umumkan, terserah beliau. Tadi baru update dulu ke Pak Presiden mengenai kondisi pandemi seperti apa sekarang. Negara-negara lain di G20 seperti apa, ASEAN seperti apa, kemudian alternatif kebijakan yang mau diambil," kata Menkes Budi Gunadi di Istana Kepresidenan Jakarta. **(Ant)-d**

Menag Sambungan hal 1

Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyusul perkiraan akan terjadi perbedaan tanggal perayaan Idul Adha 1444 H antara warga Muhammadiyah dengan versi Pemerintah.

PP Muhammadiyah telah mengeluarkan Maklumat Nomor 1/MLM/10/E 2023 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zuhhijah 1444 H yang menyebutkan 1 Zuhhijah 1444 H jatuh pada Senin 19 Juni 2023, sehingga Hari Raya Idul Adha 1444 H yang dirayakan setiap tanggal 10 Zuhhijah jatuh pada Rabu 28 Juni 2023.

Kota Surakarta 2022-2027 pada Rabu (7/6) pekan lalu, Abdul Mu'ti mengusulkan di hadapan Wakil Walikota Surakarta Teguh Prakosa agar libur Lebaran Idul Adha diberikan dua hari. "Jadi liburnya dua hari, yaitu tanggal 28 atau 29 Juni 2023. Saya kira yang pegawai negeri setuju itu. Ini usul Pak Wakil Walikota, karena pemah ada warga Muhammadiyah yang menjadi ASN tidak ikut Lebaran (Idul Adha) karena harus pergi ke kantor," kata Mu'ti seperti dikutip dari situs resmi Muhammadiyah.

Sementara Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 menetapkan Hari Libur Nasional Idul Adha 1444 H jatuh pada 29 Juni 2023.

Oleh karena itu, di sela-sela Pengukuhan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan 'Aisyiyah

Wacana tersebut sempat ditanggapi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang menyebut hal itu perlu dikaji dan direpsons agar dicarikan solusi bersama. "Saya sudah sampaikan perlu dikaji perlu direpsons. Kan cuti bersama itu kan pakai Perpres (Peraturan Presiden), kalau Presiden belum memberikan arahan ya belum," ujar Muhadjir di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/6). **(Ant/San)-f**

RI Usul Sambungan hal 1

dengan pelaksanaan bio visa dalam proses pemvisaan jemaah. Menurunnya, ada kendala perekaman sidik jari jemaah dalam proses bio visa. Hal itu berdampak pada proses pemvisaan secara keseluruhan. "Kita usul agar ada solusi lain melalui perekaman retina mata yang juga sama akuratnya. Teknologinya bisa dikembangkan. Usulan ini diapresiasi Arab Saudi," ujarnya.

Usulan ketiga, perluasan layanan fast track. Indonesia mengusulkan agar layanan ini bisa dikembangkan di bandara lainnya. "Kita ada 13 embarkasi dan semua diusulkan bisa mendapat layanan fast track," paparnya.

Terakhir, usulan yang disampaikan delegasi Indonesia berkenaan dengan informasi kuota. Menurut Nasrullah, proses penyiapan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia memakan waktu panjang. Oleh karena itu, ketentuan terkait kuota haji diharapkan dapat diinformasikan lebih awal.

Beberapa negara pada forum tersebut, juga mengusulkan hal sama, utamanya terkait pemberitahuan kepastian kuota haji

dan penambahan layanan fast track. Arab Saudi menghimpun usulan yang ada dari berbagai negara untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan layanan pada operasional haji mendatang.

Sementara itu, Kepala PPIH Arab Saudi Daker Makkah Subhan Cholid menyebut sudah lebih dari 100 orang jemaah yang mengajukan mutasi kloter atau *tanazul*. Untuk keperluan ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jemaah untuk bisa *tanazul*.

Subhan menjelaskan, *tanazul* adalah mutasi perpindahan satu kloter ke kloter lain, baik itu kloter yang lebih awal maupun kloter yang lebih akhir. "Itu dimungkinkan selama masih tersedia *seat* (pesawat) di kloter yang dituju," ucap Subhan.

Kemudian, jemaah haji yang diizinkan melakukan *tanazul* pertama yaitu pemuatan lebih cepat untuk jemaah sakit. Namun, harus ada keterangan dari dokter kloter dan tetap harus ada ketersediaan *seat*. "Sakit itu ada dua kemungkinan. Sakit baring dan sakit duduk. Kalau baring butuh *seat* lebih banyak," kata Subhan.

Kedua, *tanazul* untuk penggabungan jemaah terpisah. Misalnya, pada waktu akan berangkat tetapi jemaah tersebut sakit di embarkasi, sehingga ia diberangkatkan pada kloter berikutnya. Atau, yang terpisah antara keberangkatan dengan keluarga. Misalnya, orang tua, anak, suami istri yang terpisah karena visanya tidak keluar.

"Pada saat mau berangkat belum keluar visanya. Maka begitu sampai sini itu dimungkinkan diajukan mutasinya sejauh *seat*nya tersedia," jelas Subhan.

Kemudian, juga soal kedinasan. Misalnya, ada seseorang yang mendaftar haji sudah lama dan menunggu antrean lama. Kemudian, saat ini ia sudah jadi pejabat dan memiliki penugasan yang tak bisa dihindari. Maka, dia bisa mengajukan proses *tanazul*.

Menurut Subhan, pascapuncak haji ini, jumlah yang mengajukan *tanazul* sudah cukup banyak. Mencapai ratusan dan yang mendominasi adalah jemaah yang tertunda keberangkatannya karena sakit di embarkasi. **(Ati)-d**

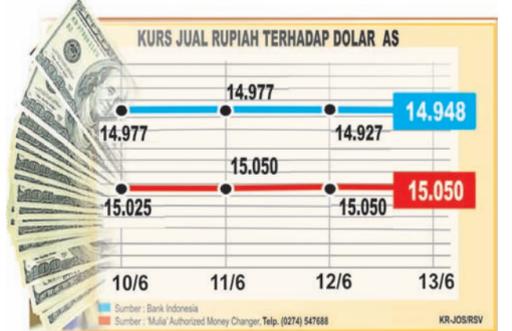
Muhammadiyah Sambungan hal 1

diberikan kepada Nurul yang berusia 49 Tahun, bukan kepada Nurul yang telah berusia 50 Tahun.

Disebutkan, dengan tidak diselenggarakannya seleksi pimpinan KPK maka telah terjadi pelanggaran administrasi dalam proses seleksi pimpinan KPK. Pimpinan KPK bagaimanapun diseleksi Pemerintah dan DPR. Jika diperpanjang 1 tahun, artinya pimpinan KPK tidak diperpanjang atas dasar seleksi sebagaimana mestinya hanya atas dasar putusan MK dan keputusan presiden. "Presiden tidak dapat memperpanjang seseorang menjadi pimpinan KPK karena prosedurnya tetap harus melalui seleksi dua lembaga," tandas Trisno Rahardjo.

Pada titik ini pemerintah disebutnya berpotensi melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan telah mencampurkan wewenang. Sehingga berpotensi melanggar administrasi pemerintahan sebagaimana diatur UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jika itu dipaksakan pemerintah, maka pemerintah dapat digugat di pengadilan tata usaha

berpikir hukumnya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Selain itu juga meminta kepada publik untuk terus mengawasi MK sebab peradilan konstitusional merupakan tempat perlindungan hak konstitusional warga negara bukan untuk segelintir orang. **(Fsy)-f**



Prakiraan Cuaca				Rabu, 14 Juni 2023	
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Suhu C	Kelembaban
Bantul				23-31	70-95
Sleman				23-30	75-95
Wates				23-31	70-95
Wonosari				23-30	70-95
Yogyakarta				23-31	70-95

Rekrutmen Sambungan hal 1

sarjana baru atau *fresh graduate*, terutama yang memiliki kemampuan talenta digital.

Memasuki Revolusi Industri 4.0, peluang generasi muda atau *fresh graduate* untuk dapat diterima sebagai CPNS selama ini boleh dikata tidak terlalu besar. Kebanyakan sarjana yang baru lulus dan berusaha mencari pekerjaan sebagai tempat untuk bergantung, tidak mudah menembus pasar kerja yang makin kompetitif. Meski generasi muda lahir di era milenial dan sudah lama beradaptasi dengan berbagai teknologi informasi dan internet, namun sebagian besar anak muda belum memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Peluang mereka untuk dapat diterima bekerja di sektor perekonomian digital tidak selalu mulus.

Bagi lulusan perguruan tinggi yang memiliki talenta dan keahlian yang memadai, peluang mereka dapat terserap dalam pasar kerja tentu cukup besar. Tetapi lain soal ketika sebagian besar generasi muda ternyata masih gagap bersaing dengan para pencari kerja nasional, apalagi

dengan para pencari kerja global yang memiliki keahlian lebih.

Di Indonesia, tantangan yang dihadapi para pencari kerja untuk dapat terserap menjadi ASN, antara lain adalah: *Pertama*, memastikan kurikulum pendidikan di lingkungan perguruan Tinggi (PT) yang selalu mengikuti perkembangan dan mampu merespons perubahan baru yang terjadi di dunia kerja. Sudah banyak PT melakukan redesign kurikulum. Namun demikian, untuk memfasilitasi agar kurikulum yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, tidak ada lain harus dilakukan didukung kesediaan PT untuk terus menata diri dan menyesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman.

Kedua, bagaimana memastikan calon ASN di masa ini agar tidak terkontaminasi perilaku buruk dari PNS sebelumnya yang sering terlibat dalam praktik korupsi. Berbeda dengan lapangan kerja non-PNS yang bebas dan rata-rata relatif lebih besar gajinya, penghasilan ASN rata-rata lebih kecil. Tidak sekali-dua kali terjadi,

ASN yang kurang sabar memilih jalan pintas untuk memperkaya diri. Ujung-ujungnya justru terjerumus dalam perilaku korup yang merugikan dirinya.

Setelah sekian lama, rekrutmen ASN tidak dilakukan secara besar-besaran, tawaran Menpan-RB soal lowongan bagi 1 juta pencari kerja di tahun 2023 sungguh menarik dan memberikan harapan baru. Masalahnya sekarang adalah bagaimana memastikan proses rekrutmen ASN dilakukan benar-benar transparan.

Lebih dari sekadar menawarkan jumlah kesempatan kerja bagi calon ASN hingga 1 juta lowongan, yang dibutuhkan juga jaminan bahwa seluruh proses *recruitment* dilakukan dalam sistem yang benar-benar terbuka, transparan dan melibatkan pengawasan dari masyarakat. Proses rekrutmen ASN yang slintutan, niscaya akan melahirkan syakwasangka dan rumor yang kontra-produktif **(Penulis adalah Guru Besar Sains Informasi FISIP Universitas Airlangga)-f**



Ferian Fauzi Abdulloh
Dosen Informatika Universitas AMIKOM Yogyakarta

PADA suatu masa, ada seorang anak gembala muda yang tinggal di sebuah desa kecil dekat bukit. Dia sering merasa bosan dan kesepian,

sehingga dia menghibur dirinya dengan *prank* warga desa. Suatu hari, dia memutuskan untuk bermain-main dengan berteriak, "Serigala! Serigala! Serigala datang!" Warga desa pun percaya pada anak tersebut, berlari ke bukit untuk mengusir serigala tersebut. Namun ketika mereka sampai di sana, mereka tidak menemukan apa-apa, akhirnya mereka sadar kalau mereka telah di-*prank* oleh anak itu. Warga desa marah dan mengomelnya karena leluconnya yang membuat banyak orang tertipu. Tetapi anak itu tidak mendengarkan dan malah berencana untuk melakukannya lagi.

Suatu hari, ketika anak itu sedang menggembalakan kawanannya, seekor serigala benar-benar muncul. Dia berteriak, "Serigala! Serigala!" Tetapi kali ini, tidak ada warga desa yang datang untuk membantunya. Warga desa sudah muak dengan kebohongannya dan menolak untuk mempercayainya.

Serigala dengan cepat mengejar domba-domba milik anak tersebut, dan akhirnya anak itu sendirian dan ketakutan, domba-domba miliknya habis karena dimakan kawanannya serigala, dan sebagian lain lari entah kemana. Terlambat sudah untuk

PRANK !

meminta bantuan. Kawanannya itu sudah pergi dengan perut kenyang. Anak itu akhirnya mendapatkan pelajaran atas konsekuensi suka berbohong.

Sejak itu, anak itu menjadi lebih jujur dan berpikir dengan matang. Dia tidak lagi suka melakukan *prank* pada siapa pun karena ia perlahan-lahan memahami pentingnya kepercayaan dan kejujuran. Warga desa, meskipun awalnya marah padanya, juga akhirnya memaafkannya dan melihat perubahannya.

Seiring berjalannya waktu, anak itu dikenal karena kejujurannya dan integritasnya. Dia meminta

maaf kepada warga desa atas perilaku masa lalunya dan bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaan mereka kembali. Dia secara aktif berkontribusi dalam komunitas dengan membantu orang lain dan menunjukkan kebaikan hati. Warga desa, melihat perubahan yang tulus pada dirinya, perlahan-lahan memaafkannya dan menyambutnya kembali ke dalam kelompok mereka.

Transformasi anak itu memiliki dampak positif pada seluruh desa. Kejujuran dan pemikiran yang matang yang baru ditemukannya menginspirasi orang lain untuk merenungkan tindakan mereka sendiri

dan pentingnya menjadi jujur. Warga desa mulai menghargai nilai kepercayaan dan persatuan, dan mereka bekerja bersama untuk mengatasi tantangan dan saling mendukung.

Seiring berjalannya waktu, anak gembala yang dulu nakal menjadi seorang pemuda yang bertanggung jawab. Dia menjadi anggota yang dihormati dalam masyarakat dan mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Dia menggunakan pengalamannya untuk mengajarkan anak-anak yang lebih muda tentang konsekuensi berbohong dan pentingnya kejujuran.

Kisah anak gembala ini

menjadi cerita peringatan bagi generasi muda kita. Cerita itu menjadi pengingat bahwa kejujuran dan kepercayaan adalah nilai-nilai penting, dan bahwa konsekuensi dari tindakan kita dapat memiliki dampak yang berlangsung lama pada diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Dan begitulah, anak gembala yang dulu nakal menjadi pribadi yang bijaksana dan dapat dipercaya, meninggalkan warisan integritas dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti jalan kejujurannya.